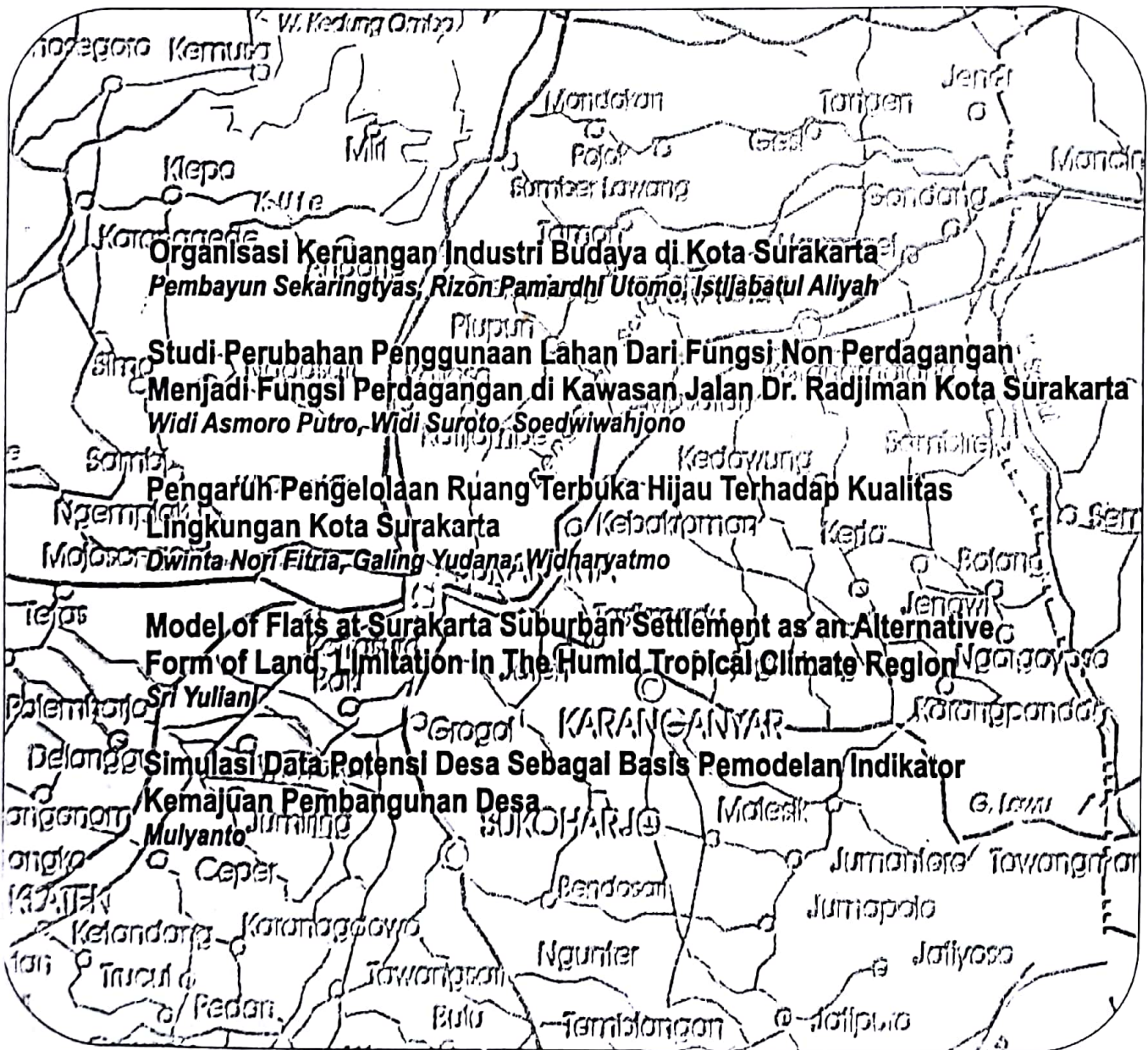


# Region

**Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif**



**Penanggungjawab:** Ketua LPPM UNS, Surakarta

**Pemimpin Penyunting:** Fauzan Ali Ikhsan, ST,MT

**Wakil Pemimpin Penyunting:** Lukman Hakim, SE.,M.Si

**Penyunting Ahli:**

Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D (UNS)

Ir. Holy Bina Wijaya, MUM (UNDIP)

Pieter Abdullah, SE., MA. (Bank Indonesia)

**Penyunting Pelaksana:**

Rr. Ratri Werdiningtyas, S.T., M.T.

**Tata Usaha:**

Ir. Ana Hardiana, MT

**Alamat Sekretariat:**

**PUSAT INFORMASI DAN PEMBANGUNAN WILAYAH (PIPW)  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir.Sutami No.36 Ketingan Surakarta telp. 0271 - 632916, faks. 0271 - 632368

Email : [pipw@uns.ac.id](mailto:pipw@uns.ac.id)

Website : <http://pipw.lppm.uns.ac.id>

---

**Region**, diterbitkan oleh Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) UNS Surakarta mulai tahun 2006; berisi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, resensi buku, yang kesemuanya berada dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota serta perencanaan partisipatif. Jurnal terbit dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. Redaksi menerima tulisan ilmiah dalam bidang-bidang yang relevan dengan masalah perencanaan wilayah dan kota serta pembangunan daerah, dengan ketentuan sebagaimana dalam Panduan pada sampul belakang dalam. Naskah yang masuk akan dievaluasi oleh Dewan Penyunting. Redaksi berhak melakukan perubahan pada tulisan yang layak muat demi konsistensi gaya, namun tanpa merubah maksud isinya. Hak cipta intelektual dari tulisan tetap melekat pada Penulis.

**DAFTAR ISI**

Organisasi Keruangan Industri Budaya Di Kota Surakarta <i>Pembayun Sekaringtyus, Rizon Pamardhi Utomo, Istijabatul Aliyah</i>	1 - 10
Studi Perubahan Penggunaan Lahan Dari Fungsi Non Perdagangan Menjadi Fungsi Perdagangan Di Kawasan Jalan DR. Radjiman Kota Surakarta <i>Widi Asmoro Putro, Widi Suroto, Soedwihajono</i>	11 - 18
Pengaruh Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Kualitas Lingkungan Kota Surakarta <i>Dwinta Nori Fitria, Galing Yudana, Widharyatmo</i>	19 - 26
Model Of Flats At Surakarta Suburban Settlement As An Alternative Form Of Land Limitation In The Humid Tropical Climate Region <i>Sri Yuliani</i>	27 - 36
Simulasi Data Potensi Desa Sebagai Basis Pemodelan Indikator Kemajuan Pembangunan Desa <i>Mulyanto</i>	37 - 58



# SIMULASI DATA POTENSI DESA SEBAGAI BASIS PEMODELAN INDIKATOR KEMAJUAN PEMBANGUNAN DESA

MULYANTO  
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)  
E-MAIL: YANTO.MUL@GMAIL.COM

*Abstract: The purpose of this research was to construct the model for measuring the progress of village development, indicated by the Village Development Index (VDI). Variables used in this study were adopted from the secondary data obtained from the document of District in the Vignettes (Kecamatan Dalam Angka) from 9 districts in Sragen Regency in year 2009. There were 8 indicators that influence to the progress of village development. Using the simple average method developed by Wang (2007) and doing the correlations of Product Moment between two indicators, it was found that the infrastructure of village economic and the VDI have a great correlations compared with the others. While the indicator of the asset and village finance and the VDI didn't have a correlations significantly. All of 8 indicators had a positive relationship with the VDI. It means that if the value or index of indicator rises, it will also rise to the value of the VDI. Dividing villages into 2 groups, namely the center area (Wilayah Pusat) and the medium area (Wilayah Tengah), indicated by the distance between village office and regency office; it was found that the value of the VDI in the center area was higher than the value of the VDI in the medium area.*

*Key words: Village Development Index*

## PENDAHULUAN

Dari perspektif antropologi pedesaan, kondisi kehidupan masyarakat desa dicirikan dengan *peasant* dan subsistensi. Kedua hal ini sebagai penyebab adanya lingkaran kemiskinan dan tata nilai. *Peasant* merupakan ketidakberdayaan yang kemudian menjadi kebiasaan dan melembaga menjadi tata nilai atau norma umum yang bermuara pada kekurangan dan ketidakcukupan. Sementara, subsistensi adalah kegiatan usaha tani pedesaan yang hanya cukup untuk kepentingan sendiri atau cukup untuk makan saja. Kedua hal di tersebut, akhirnya merujuk kepada kondisi ketidakberdayaan dan kemiskinan di pedesaan (Pahmi Sy, 2010: 1).

Dari data yang ada juga menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan pendapatan nasional menjadi sangat berbeda jauh jika

dikaitkan dengan konteks pembangunan pedesaan dan perkotaan, dengan simpulan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan dan tingkat kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar dibanding di perkotaan (RPJMN Tahun 2010-2014). Oleh karenanya, pemerintah Indonesia dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 (Bappenas, 2008), telah mengalokasikan dana untuk program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan sekitar Rp.7,25 triliun atau sekitar 42,04%; dan menempati urutan pertama dari 13 program pembangunan pedesaan dengan anggaran total sekitar Rp.17,24 triliun.

Di lain pihak, dari data yang ada juga menunjukkan bahwa jumlah desa di Indonesia terus mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar 61.409 desa pada tahun 2005, menjadi sekitar 67.211 desa pada tahun 2008 (BAPPENAS, 2010).



Berdasarkan pembagian wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, terdapat 2 (dua) provinsi yang secara administrasi mempunyai jumlah wilayah yang relatif banyak di wilayah Jawa-Bali, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten dan kota (29 kabupaten dan 6 kota), 564 kecamatan, dan 7.817 desa. Sedang, Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kabupaten dan kota (29 kabupaten dan 9 kota), 654 kecamatan, dan 7.682 desa.

Data Statistik Potensi Desa (Data Podes Tahun 2008) di Provinsi Jawa Tengah (BPS, 2008b) memaparkan pembagian wilayah administrasi terendah menurut klasifikasi pemerintahan desa, yaitu dikelompokkan ke dalam desa pesisir (*coastal*) dan desa bukan pesisir (*non-coastal*). Jumlah desa di Jawa Tengah sekitar 7.810 desa, dengan rincian sejumlah 283 desa adalah desa pesisir dan sisanya sejumlah 7.527 adalah desa bukan pesisir. Kajian ini akan diterapkan pada kasus desa-desa bukan pesisir di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Sragen, yang mencakup 6 kecamatan, dengan jumlah desa sebanyak 93 desa.

Studi tentang perdesaan juga sudah banyak dilakukan, antara lain oleh Mubyarto, dkk (1994). Dalam studinya, Mubyarto (1994) mengklasifikasikan desa berdasar tipologi desa yang dikembangkan oleh Depdagri dalam Kajian Prospek Perdesaan 1994 Desa Tertinggal di Provinsi Jawa Tengah. Kesembilan desa tersebut, yaitu: (i) Desa Persawahan; (ii) Desa Lahan Kering; (iii) Desa Perkebunan Tebu; (iv) Desa Peternakan; (v) Desa Nelayan; (vi) Desa Hutan; (vii) Desa Industri Kecil; (viii) Desa Buruh Industri; dan (ix) Desa Jasa dan Perdagangan. Penekanan pada studi ini adalah prospek tingkat keswadyaan masyarakat di desa-desa tertinggal.

Studi lain yang dilakukan oleh Indopov - World Bank (2006) yang mengkaji Iklim Investasi Pedesaan

Perusahaan Non-Petani Tingkat Kabupaten, menggunakan sampel di 6 kabupaten di Indonesia yang masing-masing mewakili: (i) Daerah Perkebunan, (ii) Daerah Kaya Sumber Mineral, (iii) Daerah Pesisir Hutan, (iv) Daerah Pertanian Subur, (v) Daerah Perkotaan Aglomerasi, dan (vi) Daerah Pertanian Kering.

Studi ini ditujukan untuk mengkaji faktor atau indikator yang mempengaruhi kemajuan pembangunan desa di Provinsi Jawa Tengah dengan mengambil kasus di desa-desa dalam kategori bukan pesisir, yaitu di Kabupaten Sragen. Pembangunan desa dipengaruhi dan ditentukan oleh beberapa indikator yang hasil akhirnya disusun ke dalam suatu Indeks Pembangunan Desa (IPDesa), di mana IPDesa yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan desa yang semakin baik.

Jika dalam publikasi Data Podes Provinsi Jawa Tengah (BPS, 2008b: 17), desa diklasifikasikan menurut sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk ke dalam 7 (tujuh) sektor mata pencaharian, yaitu: (i) Pertanian, (ii) Pertambangan dan Penggalian, (iii) Industri Pengolahan, (iv) Perdagangan Besar dan Eceran, (v) Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, (vi) Jasa, dan (vii) Lainnya; dalam studi ini pembagian desa hanya dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: (i) kelompok desa dalam Wilayah Pusat, dan (ii) kelompok desa dalam Wilayah Tengah. Tujuan pembagian ini untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa kemajuan pembangunan desa cenderung lebih cepat terjadi pada desa-desa yang berada dekat dengan pusat pemerintahan, sebagaimana desa-desa pemenang lomba yang setiap tahun diadakan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, setiap tahun diadakan lomba desa di seluruh Indonesia. Perlombaan



desa dilaksanakan melalui proses evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah bersama masyarakat desa. Sebelum munculnya Permendagri tersebut, telah dikeluarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Berdasar kedua Permendagri tersebut, seperangkat data desa sudah mulai disusun, yaitu: Data Monografi Desa, Data Potensi Desa dan juga Kecamatan Dalam Angka. Data yang bersumber dari buku Kecamatan Dalam Angka di 9 Kecamatan di Kabupaten Sragen dijadikan basis dalam pemodelan indikator kemajuan pembangunan desa. Studi ini pada dasarnya mengembangkan model Bappenas (2001), Wang (2007), dan juga Depdagri (2007).

Studi yang hampir sama juga sudah banyak dikembangkan, yaitu: (i) Model *Indicators of Good Governance (IGG)* oleh *Philippine Institute for Development Studies* (1999); (ii) Model *Regional Attractiveness Index (RAI)* oleh *Price-Water-houseCooper* (2001); (iii) Model *Urban Governance Index (UGI)* oleh *UN-HABITAT* (2002) dalam rangka *Global Campaign on Urban Governance*; (iv) Model *Environmental Sustainability Index (ESI)* oleh *Yale University* (2005); (v) Model *Indicators of Sustainability Development (ISD)* oleh *United Nations* (2007); (vi) Model *Regional Development Index (RDI)* oleh Wang (2007) di China; dan juga (vii) Model *Vulnerability and Resilience Index (VRI)* oleh *Malta University* (2008).

## METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan kasus di 93 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Dari 93 desa sampel, kemudian dikelompokkan ke dalam 2 (dua) wilayah, yaitu: (i) Wilayah Pusat, yang mencakup 3 kecamatan dengan sampel sebanyak 30 desa; dan (ii) Wilayah Tengah, yang mencakup 6 kecamatan

dengan sampel sebanyak 63 desa. Tiga kecamatan Wilayah Pusat mencakup: (i) Kecamatan Sidoharjo; (ii) Kecamatan Ngrampal; dan (iii) Kecamatan Kedawung. Sedang 6 (enam) kecamatan Wilayah Tengah mencakup: (iv) Kecamatan Masaran; (v) Kecamatan Sambungmacan; (vi) Kecamatan Gondang; (vii) Kecamatan Sambirejo; (viii) Kecamatan Tangen; dan (ix) Kecamatan Tanon.

Metode penentuan sampel dalam studi ini masuk dalam kategori purposif (*purposive sampling strategy*) yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak memperhatikan keterwakilan populasi melainkan pada keterwakilan permasalahan dan keterhandalan informasi (Conny, 2007: 16; Erwan Agus dan Dyah Ratih, 2007: 47-8; dan Tumpal P. Saragi, 2004: 20-1).

Sub Indeks yang membentuk Indeks Pembangunan Desa (IPDesa) atau *Village Development Index (VDI)* mencakup 8 (delapan) Sub Indeks, yaitu: (i) Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik (KAJPP); (ii) Kekayaan dan Keuangan Desa (KKD); (iii) Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa (SPPD); (iv) Akses Informasi Masyarakat Desa (AIMD); (v) Pendidikan Masyarakat Desa (DikMD); (vi) Kesehatan Masyarakat Desa (KesMD); (vii) Ketertiban dan Keamananan Masyarakat Desa (TibKMD); dan (viii) Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Desa (JahKMD). Kedelapan sub indeks tersebut kemudian diturunkan lagi ke dalam indikator yang semuanya berjumlah 40 indikator. Definisi operasional dari ke-8 sub indeks tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik (KAJPP)**, dibentuk oleh 4 (empat) indikator:

- a. Persentase Jumlah Aparatur Desa yang berpendidikan Akademi (AK) dan Perguruan Tinggi (PT) terhadap Keseluruhan Jumlah Aparatur Desa (persen).



- b. Rasio Jumlah Aparatur Desa terhadap jumlah Rumah Tangga (orang per KK).
  - c. Rasio Jumlah Rukun Tetangga (RT) terhadap jumlah Rumah Tangga (buah/unit per KK).
  - d. Rasio Luas Wilayah terhadap Jumlah Aparatur Desa (km<sup>2</sup> per orang).
2. **Kekayaan dan Keuangan Desa (KKD)**, dibentuk oleh 4 (empat) indikator:
- a. Rasio luas Tanah Kas Desa terhadap Jumlah Rumah Tangga (Ha per KK).
  - b. Persentase Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Penetapan Target PBB (persen).
  - c. Rasio PBB terhadap Jumlah Rumah Tangga (Rp 000 per KK).
  - d. Rasio Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Jumlah Rumah Tangga (Rp 000 per KK).
3. **Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa (SPPD)**, dibentuk oleh 6 (enam) indikator:
- a. Rasio Jumlah Sarana Perekonomian Desa terhadap Jumlah Rumah Tangga (buah / unit per KK).
  - b. Rasio jumlah Industri Kecil (IK) dan Industri Rumah Tangga (IRT) terhadap Jumlah Rumah Tangga (buah / unit per KK).
  - c. Rasio Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat di bidang Warung / Rumah Makan dan Transportasi terhadap Jumlah Rumah Tangga (buah / unit per KK).
  - d. Rasio Panjang Jalan Beraspal Desa terhadap Luas Wilayah Desa (km per km<sup>2</sup>).
  - e. Rasio Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor terhadap Jumlah Rumah Tangga (buah / unit per KK).
  - f. Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Jumlah Rumah Tangga (buah / unit per KK).
4. **Akses Informasi Masyarakat Desa (AIMD)**, dibentuk oleh 4 (empat) indikator:
- a. Rasio Jarak Pemerintahan Desa dengan Kecamatan terhadap Panjang Jalan Beraspal Desa (km per km).
  - b. Rasio Jarak Pemerintahan Desa dengan Kabupaten terhadap Panjang Jalan Beraspal Desa (km per km).
  - c. Rasio Sambungan Telepon terhadap Jumlah Rumah Tangga (buah / unit per KK).
  - d. Rasio Jumlah Kepemilikan Radio dan TV terhadap Jumlah Rumah Tangga (buah / unit per KK).
5. **Pendidikan Masyarakat Desa (DikMD)**, dibentuk oleh 3 (tiga) indikator:
- a. Rasio Jumlah Gedung Sekolah Dasar (SD) terhadap Penduduk Usia 6-12 tahun (buah / unit per anak).
  - b. Rasio Jumlah Murid SD terhadap Guru SD di desa (anak per guru)
  - c. Persentase Jumlah Penduduk yang lulus SMA dan Akademi / PT terhadap Jumlah Penduduk Usia 5 tahun ke atas (persen).
6. **Kesehatan Masyarakat Desa (KesMD)**, dibentuk oleh 5 (lima) indikator:
- a. Angka Kematian Kasar (CDR: *Crude Death Rate*) (kematian per 1.000 orang).
  - b. Angka Kematian Bayi (IMR: *Infant Mortality Rate*) (kematian bayi per 1.000 bayi).
  - c. Rasio Jumlah Sarana Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk (buah / unit per orang).
  - d. Rasio Jumlah Jamban terhadap Jumlah Rumah Tangga (buah / unit per KK).
  - e. Persentase Jumlah Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk (persen).
7. **Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa (TibKMD)**, dibentuk oleh 2 (dua) indikator:
- a. Rasio Sarana Peribadatan terhadap Jumlah Penduduk (buah / unit per orang).

- b. Rasio Jarak Lokasi Pemerintahan Desa dengan Kantor Polisi Sektor (Polsek) terhadap Jalan Beraspal Desa (km per km).
- 8. Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Desa (JahKMD), dibentuk oleh 12 (dua belas) indikator:
  - a. Persentase Kejadian Cerai terhadap Pernikahan (persen).
  - b. Persentase Peserta Keluarga Berencana (KB) terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) (persen).
  - c. Rasio Peserta KB terhadap Jumlah Rumah Tangga (orang per KK).
  - d. Rasio Produksi Padi terhadap Jumlah Penduduk (kwintal per orang).
  - e. Rasio Produksi Daging terhadap Jumlah Rumah Tangga (kg per KK).
  - f. Rasio Produksi Telur terhadap Jumlah Rumah Tangga (kg per KK).
  - g. Rasio Jumlah Tenaga Kerja yang terserap dalam Industri Kecil (IK) dan Industri Rumah Tangga (IRT) terhadap Jumlah Rumah Tangga (orang per KK).
  - h. Rasio Jumlah Tenaga Kerja yang terserap dalam lapangan usaha ekonomi masyarakat di bidang Warung / Rumah Makan dan Transportasi terhadap Jumlah Rumah Tangga (orang per KK).
  - i. Persentase Jumlah Penduduk yang Bekerja terhadap Jumlah Keseluruhan Penduduk (persen).
  - j. Persentase Jumlah Penduduk Usia Produktif (usia 15-64 tahun) terhadap Keseluruhan Jumlah Penduduk (persen).
  - k. Persentase Keluarga Miskin terhadap Jumlah Rumah Tangga (persen).
  - l. Persentase Rumah Berdinding Permanen terhadap Keseluruhan Rumah Penduduk (persen).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam studi ini, adalah sebagai berikut:

- 1. Data Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2009 diambil dari Buku Laporan Keuangan Desa yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen.
- 2. Selain data ADD, semua data diambil dari Dokumen Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2009 di 9 kecamatan seperti tersebut di atas, yang disusun oleh Koordinator Statistik Kecamatan atas kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sragen.

Sebelum diagregasi dalam 1 (satu) bentuk Sub Indeks dan Indeks Total (IPDesa), variabel atau indikator dasar ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam sistem penilaian dengan standar nilai 0 (tingkat pembangunan paling rendah) sampai dengan nilai 10 (tingkat pembangunan paling tinggi). Pendekatan ini pernah digunakan Wang (2007) dalam menghitung Indeks Pembangunan Daerah (*Regional Development Index*) di 31 provinsi di Republik Rakyat China (RRC).

Untuk indikator yang positif, yaitu nilai yang lebih tinggi mencerminkan tingkat pembangunan yang lebih baik, besaran nilai dihitung dengan rumus (Agarwal dan Samanta (2006) dan Wang (2007)):

$$i^{\text{th}} \text{ desa} = \frac{V_i - V_{\min}}{V_{\max} - V_{\min}} \times 10 \dots\dots\dots (3.1)$$

Sementara untuk indikator yang negatif, yaitu nilai yang lebih rendah mencerminkan tingkat pembangunan yang lebih baik, besaran nilai dihitung dengan rumus (Agarwal dan Samanta (2006) dan Wang (2007)):

$$i^{\text{th}} \text{ desa} = \frac{V_{\max} - V_i}{V_{\max} - V_{\min}} \times 10 \dots\dots\dots (3.2)$$



$$V_{\max} - V_{\min}$$

Diman  $V$ , adalah nilai suatu variabel atau indikator. Hasil indikator dasar yang telah ditransformasikan akan membentuk suatu sub indeks atau turunan sub indeks. Kumpulan dari sejumlah sub-indeks akan membentuk indeks yang lebih tinggi sampai ke bidang pembangunan tertentu dan bidang pembangunan total.

Untuk menghasilkan IPDesa digunakan Metode Pembobotan Rerata Sederhana (*Simple Average Method*) (Wang, 2007). Metode ini memberikan bobot yang sama baik pada tingkatan Sub Indeks maupun pada pembentukan indeks total. Konsekuensi dari sistem ini, semua bidang indeks mempunyai bobot yang sama dalam memberikan kontribusi terhadap indeks total. Dengan kata lain, semua sub indeks dalam satu bidang indeks bobotnya sama untuk membentuk satu bidang indeks (Wang, 2007).

Untuk mendapatkan hasil akhir Indeks Pembangunan Desa (IPDesa), dilakukan dengan rumus:

$$IPDesa(i) = (1/8) * \sum_{j=1}^8 a. SI (ij)$$

.....  
... (3.3)

Dimana: *IPDesa*, Indeks Pembangunan Desa;  $\Sigma$ , penjumlahan;  $a$ , bobot *SI* (metode rata-rata); *SI*, Sub Indeks Pembentuk IPDesa (ada 8 sub indeks);  $i$ , desa ke- $i$ ; dan  $j$ , Sub Indeks ke- $j$ . Sub Indeks (*SI*) pembentuk IPDesa, mencakup: (i) Kapasi-tas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik (*KAJPP*); (ii) Kekayaan dan Keu-angan Desa (*KKD*); (iii) Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa (*SPPD*); (iv) Akses Informasi Masyarakat Desa (*AIMD*); (v) Pendidikan Masyarakat Desa (*DikMD*); (vi) Kesehatan Masyarakat Desa (*KesMD*); (vii). Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa (*TibKMD*); dan (viii) Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Desa (*JahKMD*). IPDesa

secara total dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IPDesa(i) = (1/8) * (a.KAJPP(i1) + a.KKD(i2) + a.SPPD(i3) + a.AIMD(i4) + a.DikMD(i5) + a.KesMD(i6) + a.TibKMD(i7) + a.JahKMD(i8)) \dots (3.4)$$

Dengan menggunakan sistem rerata sederhana, maka semua bobot  $a$  (bobot sub indeks) adalah sama untuk semua sub indeks dan bidang indeks dalam memberikan kontribusi terhadap indeks total (IPDesa).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Data

Deskripsi variabel pembentuk 8 (delapan) sub indeks dilakukan dalam bentuk komparasi, yaitu antara kondisi variabel yang berasal dari desa-desa di Wilayah Pusat yang mencakup 3 kecamatan dengan sampel 30 desa; dan kondisi variabel dari desa-desa di Wilayah Tengah yang mencakup 6 kecamatan dengan sampel sebanyak 63 desa. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut:

#### a. Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik

Aparatur pemerintahan desa dengan lulusan Akademi (AK) dan Perguruan Tinggi (PT) terhadap jumlah keseluruhan aparatur desa, di Wilayah Pusat secara persentase sekitar 7,07% dan di Wilayah Tengah sekitar 6,66%. Secara absolut dari 30 desa di Wilayah Pusat ada 10 desa (sekitar 33,33%) yang tidak memiliki aparatur dengan lulusan AK dan PT, sedang untuk Wilayah Tengah dari 63 desa, ada 30 desa (sekitar 47,61%) yang tidak memiliki aparatur dengan lulusan AK dan PT. Artinya secara kualitas di bidang SDM Aparatur

di Wilayah Pusat lebih baik dibanding di Wilayah Tengah.

Dari sisi rasio jumlah Rumah Tangga (KK) yang dilayani terhadap aparaturnya desa, pelayanan di Wilayah Pusat lebih rendah rasionya dibanding di Wilayah Tengah, yaitu sekitar 0,86% dibanding dengan 0,92%. Perbedaan yang agak besar terletak pada jangkauan pelayanan berdasarkan luas wilayah, dimana pada Wilayah Pusat lebih rendah dibanding dengan Wilayah Tengah, yaitu 0,33 km<sup>2</sup>/orang dibanding 0,36 km<sup>2</sup>/orang.

#### b. Kekayaan dan Keuangan

#### Desa

Indikator rasio tanah kas desa terhadap jumlah rumah tangga di desa, antara Wilayah Pusat dan Wilayah Tengah tidak ada perbedaan, yaitu rata-rata sebesar 0,01 Ha/KK. Untuk realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perolehan di Wilayah Pusat lebih tinggi dibanding dengan Wilayah Tengah, yaitu 83,72% dibanding 77,10%. Demikian pula besarnya setoran PBB per KK dalam satu tahun di Wilayah Pusat lebih tinggi dibanding dengan Wilayah Tengah, yaitu sekitar Rp.43.000,- per KK dibanding Rp.28.500,- per KK.

Namun sisi besaran Alokasi Dana Desa (ADD) per Rumah Tangga (KK) per tahun, ADD per KK di Wilayah Pusat lebih rendah dibanding dengan alokasi untuk Wilayah Tengah, yaitu Rp.51.100,- per KK dibanding Rp.59.600,- per KK. Hal ini menandakan bahwa dari sisi perolehan dana (dari PBB) Wilayah Pusat lebih berpotensi dibanding dengan di Wilayah Tengah, namun dalam hal alokasi dananya (ADD), Wilayah Tengah

lebih banyak menyerap dana untuk pembangunan desa.

#### c. Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa

Secara rata-rata prasarana ekonomi desa di Wilayah Pusat lebih tinggi dibanding dengan di Wilayah Tengah, yaitu dengan rerata sekitar 76 unit dibanding dengan 73 unit. Namun sebaliknya untuk jumlah Industri Kecil (IK) dan Industri Rumah Tangga (IRT) lebih banyak di Wilayah Tengah, yaitu dengan rerata sebesar 37 unit untuk Wilayah Pusat dan sebanyak 100 unit di Wilayah Tengah. Hal yang sama terjadi pada jumlah usaha ekonomi di bidang warung/rumah makan dan transportasi, lebih banyak di Wilayah Tengah dibanding di Wilayah Pusat, yaitu sebesar 51 buah di Wilayah Tengah dan sebesar 26 buah di Wilayah Pusat.

Wilayah Pusat unggul dalam hal rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, yaitu dengan rerata sebesar 3 km/km<sup>2</sup> dibanding dengan sebesar 2 km/km<sup>2</sup> untuk Wilayah Tengah. Untuk kepemilikan kendaraan tidak bermesin / bermotor secara rata-rata lebih banyak di Wilayah Pusat dibanding di Wilayah Tengah, yaitu 1.077 unit/desa dibanding dengan 490 unit/desa; sedang untuk kendaraan bermesin rasionya sebesar 356 unit/desa untuk Wilayah Pusat dan sebesar 477 unit/desa untuk Wilayah Tengah.

#### d. Akses Informasi Masyarakat Desa

Jarak pemerintahan desa ke kecamatan, secara rata-rata di Wilayah Pusat lebih jauh dibanding dengan di Wilayah Tengah, yaitu dengan rerata 5 km untuk Wilayah Pusat dan sejauh 4 km untuk Wilayah Tengah.



Namun untuk desa dengan jalan beraspal secara rerata di Wilayah Pusat lebih baik kondisinya dibanding dengan di Wilayah Tengah, yaitu dengan rerata 13 km/desa di Wilayah Pusat dan sekitar 10 km/desa di Wilayah Tengah.

Ketersediaan telpon rumah sebagai sarana telekomunikasi dan informasi secara rata-rata di Wilayah Pusat lebih rendah dibanding di Wilayah Tengah, yaitu sebesar 21 unit/desa di Wilayah Pusat dibanding sebesar 40 unit/desa di Wilayah Tengah. Namun sebaliknya untuk kepemilikan radio dan TV, yaitu sebanyak 1.426 unit/desa untuk Wilayah Pusat dibanding dengan 1.056 unit/desa untuk Wilayah Tengah.

**e. Pendidikan Masyarakat Desa**

Ketersediaan gedung Sekolah Dasar (SD) secara rata-rata di Wilayah Pusat lebih banyak dibanding dengan di Wilayah Tengah, yaitu 4 unit/desa dibanding dengan 3 unit/desa. Hal ini kemungkinan juga diakibatkan oleh banyaknya anak usia sekolah 6-12 tahun, yang secara rata-rata jumlahnya juga lebih banyak, yaitu mencapai 567 anak/desa untuk Wilayah Pusat dan sejumlah 508 anak / desa untuk Wilayah Tengah. Banyaknya penduduk usia Sekolah Dasar di Wilayah Pusat juga berdampak pada banyaknya siswa SD yang menempati bangku SD, yaitu sekitar 458 siswa/desa di Wilayah Pusat dan sekitar 453 siswa / desa di Wilayah Tengah.

Rasio jumlah murid SD terhadap jumlah guru SD di Wilayah Pusat sekitar 12:1, sedang di Wilayah Tengah sekitar 14:1. Angka ini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan di Wilayah Pusat

relatif lebih baik dibanding dengan di Wilayah Tengah. Dari sisi penduduk lulusan SMA dan Akademi / PT di Wilayah Pusat juga menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibanding dengan di Wilayah Tengah, yaitu dengan besaran secara rata-rata sejumlah 693 lulusan / desa untuk Wilayah Pusat dibanding sejumlah 539 lulusan / desa untuk Wilayah Tengah.

**f. Kesehatan Masyarakat Desa**

Angka Kematian Kasar (CDR: *Crude Death Rate*) per 1.000 penduduk di Wilayah Pusat lebih tinggi dibanding di Wilayah Tengah, yaitu secara rata-rata sekitar 7 kematian / 1.000 penduduk di Wilayah Pusat dan sebesar 5 kematian / 1.000 penduduk di Wilayah Tengah. Demikian pula untuk Angka Kematian Bayi (IMR: *Infant Mortality Rate*) per 1.000 kelahiran hidup. IMR di Wilayah Pusat lebih tinggi dibanding dengan di Wilayah Tengah, yaitu sebesar 20 / 1.000 kelahiran hidup di Wilayah Pusat dibanding dengan 18 / 1.000 kelahiran hidup di Wilayah Tengah. Kondisi ini agak mengherankan karena bila dilihat dari sisi banyaknya sarana kesehatan secara rata-rata per desa, sarana kesehatan di Wilayah Pusat lebih banyak dibanding dengan di Wilayah Tengah, yaitu sekitar 5 buah / desa dibanding 3 buah / desa.

Dalam hal banyaknya sarana sanitasi keluarga, ketersediaan jamban keluarga secara rata-rata di Wilayah Pusat lebih rendah dibanding di Wilayah Tengah, yaitu sekitar 500 jamban / desa di Wilayah Pusat dibanding dengan sekitar 664 jamban / desa di Wilayah Tengah. Untuk jumlah tenaga medis relatif tidak berbeda antara Wilayah Pusat dan Wilayah

Tengah, yaitu sekitar 6 tenaga medis / desa.

#### g. Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa

Jumlah fasilitas peribadatan secara rata-rata di Wilayah Pusat lebih tinggi dibanding di Wilayah Tengah, yaitu sekitar 23 buah/desa untuk Wilayah Pusat dibanding dengan 21 buah/desa untuk Wilayah Tengah. Untuk rerata jarak lokasi Pemerintahan Desa ke Kantor Polisi Sektor (Polsek), menunjukkan bahwa rerata jangkauan di Wilayah Pusat ke Polsek lebih jauh dibanding di Wilayah Tengah, yaitu sekitar 5 km di Wilayah Pusat dibanding dengan 4 km di Wilayah Tengah.

#### h. Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Desa

Untuk indikator persentase penduduk yang cerai, di Wilayah Pusat lebih tinggi dibanding dengan dengan Wilayah Tengah, yaitu sekitar 9% per desa di Wilayah Pusat dibanding sekitar 8% per desa di Wilayah Tengah. Untuk persentase Keluarga Berencana (KB) terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) secara rata-rata di Wilayah Pusat juga lebih tinggi dibanding di Wilayah Tengah, yaitu sekitar 83% dibanding 79%. Hal yang sama juga terjadi pada peserta Akseptor KB, yaitu sekitar 836 orang di Wilayah Pusat dan sekitar 709 di Wilayah Tengah.

Untuk produksi padi, rerata hasil produksi di Wilayah Pusat lebih besar dibanding di Wilayah Tengah, yaitu sebesar 38.374 kwintal per desa (atau sekitar 8 kwintal per penduduk) dibanding sebesar 31.664 kwintal per desa (atau sekitar 7 kwintal per penduduk). Untuk produksi telur secara rata-rata juga lebih besar di Wilayah Pusat, yaitu

sekitar 24.487 kg per desa (atau sekitar 1.536 kg per KK) dibanding sekitar 4.048 kg per desa (atau sekitar 1.326 kg per KK) untuk Wilayah Tengah. Namun untuk produksi daging sebaliknya, lebih besar di Wilayah Tengah yaitu sebanyak 4.754 kg per desa (atau sekitar 4 kg per KK) di Wilayah Tengah dan sekitar 3.073 kg per desa (atau sekitar 2 kg per KK) di Wilayah Pusat.

Rerata pekerja yang terserap dalam Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga (IK-IRT) di Wilayah Pusat lebih kecil dibanding di Wilayah Tengah, yaitu sekitar 106 pekerja per desa di Wilayah Pusat dibanding sebanyak 183 pekerja per desa di Wilayah Tengah. Demikian pula pekerja yang terserap dalam usaha ekonomi rakyat di bidang rumah/warung makan dan jasa pengangkutan, di mana rerata pekerja yang terserap sebanyak 54 pekerja per desa di Wilayah Pusat dan sebanyak 89 pekerja per desa di Wilayah Tengah. Hal ini mengandung arti bahwa di perdesaan lapangan kerja juga masih bisa diusahakan, walaupun dari sisi pendapatan yang diperoleh mungkin masih jauh dari mencukupi untuk kebutuhan sekeluarga.

Rerata penduduk yang bekerja menurut sektor ekonomi di Wilayah Pusat lebih sedikit dibanding di Wilayah Tengah, yaitu sekitar 2.349 orang per desa dibanding sekitar 2.531 orang per desa. Sebaliknya, penduduk usia produktif lebih banyak di Wilayah Pusat dibanding di Wilayah Tengah, yaitu sekitar 3.185 orang per desa dibanding sekitar 2.798 orang per desa.

Jumlah penduduk miskin secara rata-rata di Wilayah Pusat lebih sedikit dibanding di



Wilayah Tengah, yaitu sekitar 813 KK dibanding sekitar 818 KK. Kondisi ini juga berdampak pada kepemilikan rumah berdinding permanen, di mana secara rerata lebih banyak berada di Wilayah Pusat dibanding dengan yang ada di Wilayah Tengah, yaitu sekitar 539 buah dibanding sekitar 413 buah.

## 2. Analisis Kemajuan Pembangunan Desa

Dengan menyelesaikan persamaan (3.3) atau (3.4) di atas, dan dengan membagi Wilayah Pusat yang terdiri 3 kecamatan yang mencakup 30 desa; dan Wilayah Tengah yang terdiri 6 kecamatan yang mencakup 60 desa, dapat ditemukan nilai IPDesa, baik IPDesa Wilayah Pusat, IPDesa Wilayah Tengah maupun IPDesa secara total. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, ditemukan bahwa rerata Indeks Pembangunan Desa (IPDesa) Wilayah Pusat lebih tinggi dibanding dengan rerata IPDesa di Wilayah Tengah, yaitu sekitar 0,05 satuan indeks. Penjelasan selengkapnya lihat pada Gambar 4.1.

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat, ada 3 Sub Indeks pembentuk IPDesa yang reratanya lebih tinggi di Wilayah Tengah, yaitu: (i) Sub Indeks Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik (KAJPP) lebih tinggi sekitar 0,46; (ii) Sub indeks Kekayaan dan Keuangan Desa (KKD) lebih tinggi sekitar 0,22; dan (iii) Sub Indeks Kesehatan Masyarakat Desa (KesMD), lebih tinggi sekitar 0,60. Untuk Wilayah Pusat mempunyai keunggulan di 5 Sub Indeks, yaitu: (i) Sub Indeks Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa (SPPD), lebih tinggi sekitar 0,06; (ii) Sub Indeks Akses Informasi Masyarakat Desa (AIMD) lebih tinggi sekitar 0,60; (iii) Sub Indeks Pendidikan Masyarakat Desa (DikMD)

lebih tinggi sekitar 0,74; (iv) Sub Indeks Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa (TibKMD) lebih tinggi sekitar 0,09; serta (v) Sub Indeks Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Desa (JahKMD) lebih tinggi sekitar 0,05. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.

IPDesa di Wilayah Pusat yang lebih tinggi dibanding IPDesa di Wilayah Tengah, secara umum mengisyaratkan bahwa pembangunan di desa-desa yang dekat dengan pusat pemerintahan cenderung lebih baik dibanding dengan pembangunan di desa-desa yang semakin jauh lokasinya dari pusat pemerintahan.

Dari hasil perhitungan derajat hubungan atau korelasi antara IPDesa dengan Sub Indeks pembentuk IPDesa ditemukan bahwa Sub Indeks Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa (SPPD) mempunyai korelasi yang paling tinggi terhadap IPDesa, yaitu sebesar 0,726 dengan tingkat kesalahan sebesar 0%. Satu-satunya sub indeks pembentuk IPDesa yang tidak berhubungan dengan IPDesa adalah Sub Indeks Kekayaan dan Keuangan Desa (KKD) dengan tingkat kesalahan sebesar 46,20%. Semua sub indeks mempunyai hubungan yang positif terhadap IPDesa. Hal ini mempunyai makna bahwa naiknya ke delapan sub indeks tersebut akan berdampak pada kenaikan IPDesa. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 41 dan Gambar 4.2 sebagai berikut.

Hipotesis yang menyatakan bahwa kemajuan pembangunan desa cenderung lebih baik di desa-desa yang dekat dengan pusat pemerintahan secara umum adalah benar, namun tidak secara khusus. Dengan kata lain, dari studi yang



dilakukan dengan membagi sampel menjadi Wilayah Pusat dan Wilayah Tengah, hasil perhitungan Indeks Pembangunan Desa (IPDesa) di Wilayah Pusat secara rata-rata lebih besar dibanding dengan IPDesa di Wilayah Tengah. Namun jika kajian dikelompokkan ke dalam Wilayah Pusat dan Wilayah Tengah, ternyata dari 8 Sub Indeks pembentuk IPDesa, ada 3 sub indeks yang reratanya lebih tinggi di Wilayah Tengah, yaitu: (i) Sub Indeks Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik (KAJPP); (ii) Sub Indeks Kekayaan dan Keuangan Desa (KKD); dan (iii) Sub Indeks Kesehatan Masyarakat Desa (KesMD). Beberapa hal yang bisa menjelaskan kondisi ini adalah sebagai berikut:

- Sub Indeks KAJPP lebih tinggi di Wilayah Tengah, kemungkinan disebabkan oleh tingginya pelayanan oleh aparatur pemerintah desa yang diukur dari rasio apartur desa terhadap jumlah Rumah Tangga (KK), yang menghasilkan angka sekitar 0,92% di Wilayah Tengah dan sebesar 0,86% di Wilayah Pusat. Di samping itu kemungkinan juga diakibatkan oleh rerata jumlah kelembagaan Rukun Tetangga (RT) yang lebih besar di Wilayah Tengah yaitu sekitar 29 RT, dibanding di Wilayah Pusat yang jumlahnya sekitar 28 RT.
- Sub Indeks KKD lebih tinggi di Wilayah Tengah, kemungkinan disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu: (i) rata-rata kepemilikan tanah kas di Wilayah Tengah jauh lebih besar dibanding di Wilayah Pusat, yaitu sekitar 18 Ha per desa dibanding 10 Ha per desa; dan (ii) rata-rata Alokasi Dana Desa (ADD) yang lebih besar di Wilayah Tengah yaitu sekitar Rp.63.000 per KK dibanding sekitar Rp.54.000 per KK di Wilayah Pusat.
- Sub Indeks KesMD lebih tinggi di Wilayah Tengah, kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal: (i)

rerata Angka Kematian Kasar (CDR: *Crude Death Rate*) per 1.000 penduduk di Wilayah Tengah lebih rendah dibanding di Wilayah Pusat, yaitu sekitar 5 kematian / 1.000 penduduk dibanding sekitar 7 kematian / 1.000 penduduk; (ii) rerata Angka Kematian Bayi (IMR: *Infant Mortality Rate*) per 1.000 kelahiran hidup di Wilayah Tengah lebih rendah dibanding di Wilayah Pusat, yaitu sekitar 18 kematian / 1.000 kelahiran hidup dibanding sekitar 20 kematian / kelahiran hidup; (iii) rerata kepemilikan jamban di Wilayah Tengah lebih besar dibanding di Wilayah Pusat, yaitu sekitar 664 buah per desa dibanding sekitar 500 buah per desa.

- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang menempati posisi sebagai Kepala Desa / Sekretaris Desa / Kepala Urusan / Petugas Teknis Lapangan (Petugas Teknis Desa, Modin, Jogoboyo) / Kepala Dusun yang mempunyai tingkat kelulusan dari Akademi (AK) maupun Perguruan Tinggi (PT) masih relatif rendah/terbatas. Di Wilayah Pusat sekitar 33,33% desa tidak memiliki aparatur dengan lulusan AK dan PT, di Wilayah Tengah sekitar 47,61% desa, dan secara total ada sekitar 43,01% desa. Dengan kata lain, rasio aparatur pemerintahan desa dengan lulusan AK dan PT terhadap keseluruhan jumlah aparatur desa di Wilayah Pusat secara rata-rata hanya sekitar 7,07%; di Wilayah Tengah sekitar 6,66%; dan secara total hanya sekitar 6,80%. Artinya SDM aparatur pemerintahan desa dengan kualifikasi lulusan AK dan PT secara umum masih di bawah 10% atau masih sangat rendah.
- c. Sub Indeks Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa (SPPD) secara total mempunyai korelasi yang tinggi terhadap IPDesa yaitu sebesar 0,726. Hal ini mengandung arti bahwa keberadaan *Fasilitas Perekonomian*



Desa yang mencakup keberadaan Pasar Desa (baik Pasar Umum dan Pasar Hewan) Pertokoan, Kios, Warung, Badan Usaha Unit Desa / Koperasi Unit Desa (BUUD / KUD), Koperasi Simpan Pinjam (KOSIPA), Badan Kredit Desa (BKDesa), Lumbung Desa, dan Kredit Perseorangan; keberadaan *Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga*; keberadaan *Usaha Ekonomi Rakyat* yang mencakup usaha rumah makan/warung makan dan pengangkutan; keberadaan *Kendaraan Tidak Bermotor* yang mencakup Andong/Dokar; Gerobag Dorong; Gerobag Hewan; Becak; dan Sepeda; keberadaan *Kendaraan Bermotor* yang mencakup Mobil (baik mobil Dinas maupun mobil Pribadi), Bus / Mini Bus, Colt Umum, Truk, dan Sepeda Motor; serta ditambah dengan keberadaan *Jalan Beraspal*; akan sangat mendukung dan mendorong kemandirian pembangunan desa. Bahkan untuk indikator atau variabel *Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga* secara rerata ternyata jumlahnya lebih banyak di Wilayah Tengah dibanding di Wilayah Pusat yaitu sekitar 100 unit dibanding sejumlah 37. Hal yang sama terjadi pada indikator atau variabel usaha ekonomi rakyat di bidang warung/rumah makan dan transportasi, secara rerata lebih banyak di Wilayah Tengah dibanding di Wilayah Pusat, yaitu sebesar 51 buah dibanding sebesar 26 buah.

d. Ketersediaan fasilitas pendidikan secara umum belum merata. Hal ini diindikasikan dengan berbagai macam indikator dan variabel yang masih dominan di Wilayah Pusat, yang antara lain mencakup ketersediaan gedung Sekolah Dasar (SD) dan ketersediaan tenaga pengajar atau guru SD. Dari sisi kualitas SDM yang diindikasikan dengan rerata jumlah penduduk

yang lulus SMA dan Akademi / PT juga menunjukkan bahwa di Wilayah Pusat relatif lebih baik dibanding dengan di Wilayah Tengah, yaitu dengan besaran secara rata-rata sejumlah 693 lulusan/desa dibanding sejumlah 539 lulusan/desa.

e. Dari sisi banyaknya sarana kesehatan yang tersedia yang mencakup: Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Poliklinik Desa (Polindes), Apotik, Toko Obat, dan Toko Farmasi; di Wilayah Pusat secara rata-rata lebih banyak dibanding dengan di Wilayah Tengah, yaitu sekitar 5 buah / desa dibanding 3 buah / desa. Namun dari sisi besarnya rerata Angka Kematian Kasar (CDR: *Crude Death Rate*) dan rerata Angka Kematian Bayi (IMR: *Infant Mortality Rate*) menunjukkan angka yang secara rata-rata lebih rendah di Wilayah Tengah. Hal ini menjadi pertanyaan penting mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat CDR dan tingkat IMR lebih tinggi di Wilayah Pusat dibanding di Wilayah Tengah.

f. Dari sisi kesejahteraan masyarakat desa yang diukur dari tingkat produksi padi, produksi telur dan produksi daging belum menunjukkan pola yang diinginkan. Produksi padi dan telur dominan di Wilayah Pusat sementara untuk produksi daging dominan di Wilayah Tengah. Produksi Daging, baik berupa daging Sapi, daging Kambing dan daging Domba menunjukkan jumlah secara rerata yang masih kecil yaitu sekitar 4.754 kg per desa (atau sekitar 4 kg per KK per tahun) di Wilayah Tengah dan sekitar 3.073 kg per desa (atau sekitar 2 kg per KK per tahun) di Wilayah Pusat.



## KESIMPULAN

- Desa-desanya yang berlokasi dekat dengan pusat pemerintahan mempunyai kecenderungan tingkat kemajuannya lebih baik atau lebih cepat dibanding dengan desa-desanya yang berlokasi semakin jauh dari pusat pemerintahan.
- b. Ketersediaan fasilitas perdesaan berupa sarana dan prasarana perekonomian desa mempunyai peran penting bagi proses dan percepatan kemajuan pembangunan desa. Hal ini dibuktikan dengan tingkat keterkaitannya yang relatif tinggi dengan Indeks Pembangunan Desa (IPDesa).
  - c. Kualitas aparaturnya pemerintahan desa yang diukur dari tingkat lulusan Akademi (AK) dan Perguruan Tinggi (PT) secara umum masih rendah. Jika dibuat rasio antara lulusan AK dan PT terhadap keseluruhan jumlah aparaturnya masih kurang dari 10%. Padahal keberadaan indikator atau variabel pendidikan mempunyai peran penting dalam kemajuan pembangunan desa setelah ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian desa.
  - d. Keberadaan *Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga* dan juga *Usaha Ekonomi Rakyat* yang mencakup usaha rumah makan/warung makan dan pengangkutan, masih menjadi andalan bagi masyarakat perdesaan khususnya sebagai sarana dalam penyerapan tenaga kerja setelah usaha di sektor pertanian. Hal ini bisa dijadikan sarana untuk mengurangi tingkat pengangguran di perdesaan sekaligus juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang jumlahnya masih relatif besar, yaitu sekitar 58,57% dari sampel di 83 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Sragen dengan

definisi kemiskinan sebagai penjumlahan dari Keluarga Prasejahtera ditambah dengan Keluarga Sejahtera I dalam satuan Kepala Keluarga (KK).

- e. Produksi padi di perdesaan dalam studi ini, menunjukkan angka yang relatif banyak yaitu dengan rerata sekitar 8 kwintal per penduduk per tahun atau sekitar 800 kg per penduduk per tahun atau sekitar 66,66 kg per penduduk per bulan. Artinya untuk produksi padi dalam studi relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan keluarga. Namun tidak demikian untuk produksi telur dan daging. Produksi telur secara rata-rata hanya sekitar 7 kg per Kepala Keluarga (KK) per tahun dan produksi daging hanya sekitar 3 kg per KK per tahun. Dari kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani di perdesaan dalam studi ini, masih sangat jauh dari mencukupi. Kondisi yang demikian sering berdampak pada banyaknya penduduk perdesaan, khususnya balita yang mengalami kekurangan protein hewani.

## Saran

- a. Perlunya pemerataan dalam pelayanan pemerintahan desa oleh aparaturnya pemerintahan kabupaten kepada aparaturnya pemerintahan desa dengan tidak menjadikan faktor jarak atau lokasi sebagai kendala/hambatannya. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan cara memberdayakan aparaturnya pemerintahan kecamatan sebagai fasilitator/mediator pemerintah kabupaten, jika dilakukan secara mandiri akan menyerap dana/anggaran yang relatif besar karena beban biaya perjalanan dinas. Hal ini juga didasarkan pada pemikiran di banyak kasus



bahwa aparaturnya kecamatan sering mengalami kebingungan untuk melakukan pelayanan kepada pemerintahan kelurahan atau pemerintahan desa karena ketidakjelasan dalam pembagian urusan atau kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintahan kecamatan.

b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya pemerintahan desa menjadi hal yang mutlak dilakukan. Hal ini didasarkan pada kondisi di pemerintahan desa, dimana lulusan Akademi (AK) dan Perguruan Tinggi (PT) di pemerintahan desa masih sangat rendah. Khusus jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) sebaiknya diberikan kepada aparaturnya yang benar-benar ahli di bidang pemerintahan desa. Seorang Sekdes khususnya, dan segenap aparaturnya pemerintahan desa pada umumnya termasuk Kepala Desa sebaiknya menguasai berbagai peraturan perundangan, semisal: UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No.72/2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.30/2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa; Permendagri No.4/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; Permendagri No.37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Permendagri No.66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; Permendagri No.67/2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan; dan masih banyak peraturan perundangan yang lainnya termasuk beberapa Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa yang diturunkan dari berbagai peraturan di atas.

- c. Untuk mengurangi daya saing yang semakin tidak bisa dimenangkan oleh pelaku ekonomi perdesaan, khususnya terkait dengan keberadaan **Fasilitas Perekonomian Desa** yang mencakup keberadaan Pasar Desa, baik Pasar Umum dan Pasar Hewan, Pertokoan, Kios, Warung, Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Simpan Pinjam (KOSIPA), Badan Kredit Desa (BKDesa), Lumbung Desa, dan Kredit Perseorangan; kegiatan usaha modern dengan modal yang kuat seperti toko-toko swalayan modern harus dikendalikan keberadaannya agar tidak mematikan usaha masyarakat di perdesaan.
- d. Dengan dihasilkannya Indeks Pembangunan Desa (IPDesa), dapat dijadikan sebagai pedoman/dasar di dalam mengalokasikan anggaran pembangunan yang tidak semata-mata berdasar atas asas unsur pemerataan, namun juga mempertimbangkan prestasi kerja dari masing-masing kecamatan dan juga dari masing-masing desa; termasuk di dalamnya untuk memberikan perhatian khusus kepada desa-desa yang masih mempunyai indeks dan sub indeks yang relatif rendah.
- e. Dengan melihat berbagai indikator data yang digunakan di dalam penyusunan indeks dan sub indeks ini, maka setiap desa dapat memperbaiki basis data yang selama ini telah dan sedang didokumentasikan dalam bentuk Monografi Desa, selanjutnya mengevaluasi tingkat keakuratan datanya sekaligus mengembangkan data-data yang selama ini belum didokumentasikan dan diperlukan sebagai penunjang pembentukan indeks

pembangunan desa di masa-masa mendatang yang lebih baik dan lebih akurat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak pemberi dana, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Kementerian Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Disertasi Doktor Nomor: 488/SP2H/PP/DP2M/VI/2010, Tanggal 11 Juni 2010. Surat perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Surat No.1109/D3/PL/2010 perihal Hasil Evaluasi Penelitian Disertasi Doktor Tahun 2010 yang ditetapkan pada 4 Juni 2010, yang mendanai 681 proposal penelitian Disertasi Doktor se-Indonesia.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Direktur Program Pascasarjana dan juga Direktur Program Studi S3 Doktor Ilmu Ekonomi (DIE) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, serta pihak-pihak terkait lainnya yang tidak mungkin disebut satu persatu yang telah memungkinkan diraihnya hibah penelitian Disertasi Doktor dan juga mendukung diselesakannya studi ini.

Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya ditujukan kepada Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc, Ph.D; selaku Promotor Disertasi dan juga kepada Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, MA dan Prof. Drs. Waridin, MS, Ph.D; yang bertindak sebagai Co-Promotor Disertasi; yang dengan caranya masing-masing telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengembangan kepribadian penulis di masa-masa mendatang. Semoga amal kebaikan beliau, mendapat imbalan dari Allah, SWT.

#### DAFTAR PUSTAKA

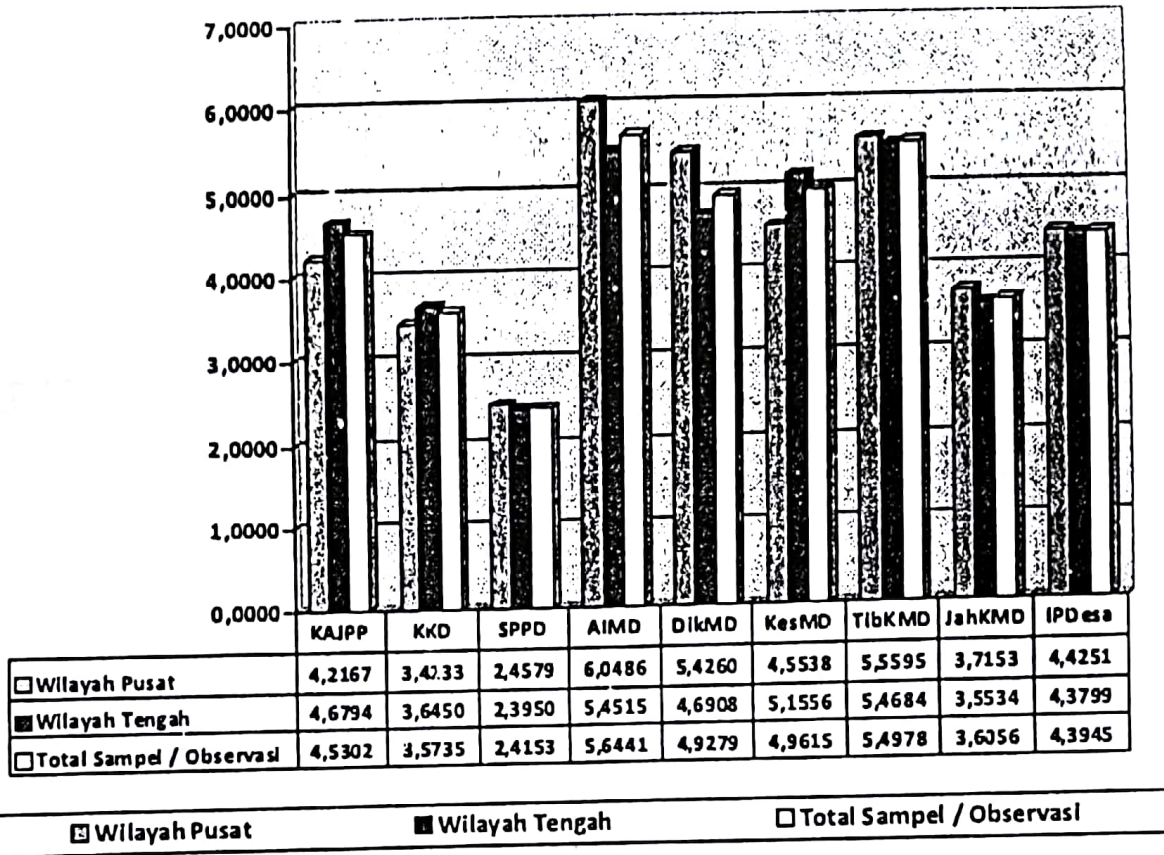
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2001). *Indeks Pembangunan Daerah (Regional Development Index)*". Draft/Rancangan dalam Bentuk Ringkasan. BAPPENAS. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah. (2008). *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029*. BAPPEDA Jateng. Semarang.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2008a). *Infrastruktur di Tingkat Kabupaten/ Kota dan Kecamatan Berdasarkan Hasil Pendataan PODES 2008*. BPS. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (2008b). *Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Tengah 2008*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah (2010). *Jawa Tengah Dalam Angka (Jawa Tengah in Figures) 2010*. BPS Jawa Tengah. Semarang.
- Gunawan Sumodiningrat. (2007). *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, Cetakan Pertama. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- KPPOD, USAID dan The Asean Fondation. (2004). *Daya Tarik Investasi Kabupaten/ Kota di Indonesia, 2003*. KPPOD, USAID dan The Asean Fondation. Jakarta.
- Moeljarto. (1995). *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Cetakan Ketiga. PT Tiara Wacana. Yogyakarta.



- Morris David Marris. (1979). *Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Live Index*. Pergaman Press. USA. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Cetakan Pertama. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Nafziger, E. Wayne. (2006). *Economics Development*, Fourth Edition. Cambridge University Press. Cambridge.
- Ogwang, Tomson. (1997). The Choice of Principal Variables for Computing the Physical Quality of Life Index. *Journal of Economic and Sosial Measurement*, Nomor 23, p. 213 - 221.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2009). *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2008-2013* [Tanggal 17 Februari].
- Peraturan Presiden. (2008). *Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009* [Tanggal 28 Mei].
- \_\_\_\_\_. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014* [Tanggal 15 Januari].
- Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia (2002). *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*.
- Streeten, Paul (1996). A Modified Human Development Index and International Comparison. *Applied Economics Letters*, Volume 3, pp. 677-82.
- Todaro, Michaél P. (2000). *Economic Development*, Seventh Edition. Wesley Longman, Inc. New York.
- UNDP. (2006). *Human Development Report 2006 (Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis)*. Palgrave Macmillan Ltd. New York.
- Wang, Xiaolu. (2007). Who's in First? A Regional Development Index for the People's Republic of China's Provinces, *ADB Institute Discussion Paper*, No. 66, May, pp. 1-31.

Sumber: Diolah dari Lampiran 1.

## LAMPIRAN



## Catatan:

1) **KAJPP**: Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik; **KKD**: Kekayaan dan Keuangan Desa; **SPPD**: Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa; **AIMD**: Akses Informasi Masyarakat Desa; **DikMD**: Pendidikan Masyarakat Desa; **KesMD**: Kesehatan Masyarakat Desa; **TibKMD**: Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa; **JahKMD**: Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Desa; dan **IPDesa**: Indeks Pembangunan Desa.

2) Tanda lingkaran merah menunjukkan bahwa Sub Indeks pembentuk IPDesa untuk komponen KAJPP, KKD dan KesMD lebih besar di Wilayah Tengah dibanding di Wilayah Pusat.

**Gambar 4.1** Besaran Indeks Pembangunan Desa (IPDesa) dengan Sub - Indeks Pembentuknya Berdasar Pembagian Wilayah Desa di Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009



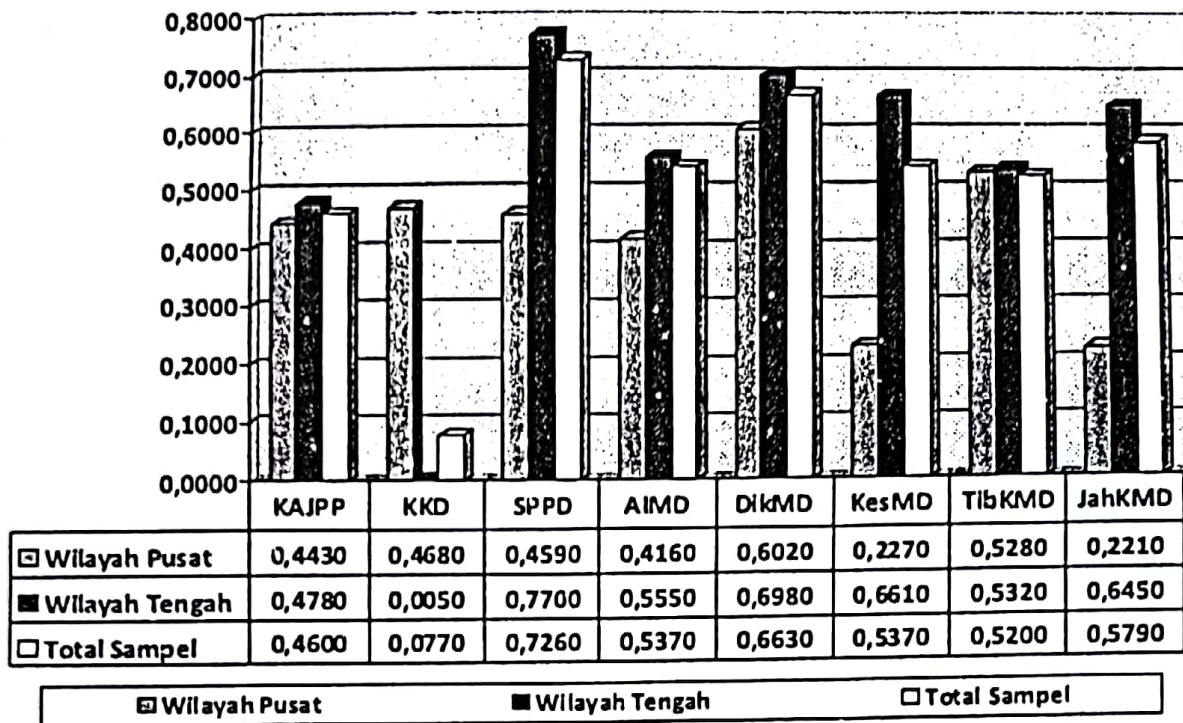
**Tabel 4.1** Besaran atau Derajat Korelasi antara Indeks Pembangunan Desa (IPDesa) dengan Indikator Pembentuk IPDesa di Kabupaten Sragen – Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Indikator Pembentuk Penentu 1)	/ IPDesa	Koefisien / Derajat Korelasi terhadap IPDesa		
		Wil. Pusat (n=30)	Wil. Tengah (n=63)	Total Sampel (n=93)
(1)		(2)	(3)	(4)
1. KAJPP		0.4430 (*)	0.4780 (**)	0.4600 (**)
2. KKD		0.4680 (**)	0.0050	0.0770
3. SPPD		0.4590 (*)	0.7700 (**)	0.7260 (**)
4. AIMD		0.4160 (*)	0.5550 (**)	0.5370 (**)
5. DikMD		0.6020 (**)	0.6980 (**)	0.6630 (**)
6. KesMD		0.2270	0.6610 (**)	0.5370 (**)
7. TibKMD		0.5280 (**)	0.5320 (**)	0.5200 (**)
8. JahKMD		0.2210	0.6450 (**)	0.5790 (**)

**Catatan:**

- 1) **KAJPP:** Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik; **KKD:** Kekayaan dan Keuangan Desa; **SPPD:** Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa; **AIMD:** Akses Informasi Masyarakat Desa; **DikMD:** Pendidikan Masyarakat Desa; **KesMD:** Kesehatan Masyarakat Desa; **TibKMD:** Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa; dan **JahKMD:** Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Desa.
- 2) (\*) Berkorelasi secara signifikan pada tingkat kesalahan sebesar 5%; (\*\*) Berkorelasi secara signifikan pada tingkat kesalahan sebesar 1%. Tanpa tanda (*dicetak miring tebal*) berarti tidak berkorelasi secara signifikan.

**Sumber:** Diolah dari Lampiran 2.



**Catatan:**

- 1) **KAJPP:** Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik; **KKD:** Kekayaan dan Keuangan Desa; **SPPD:** Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa; **AIMD:** Akses Informasi Masyarakat Desa; **DikMD:** Pendidikan Masyarakat Desa; **KesMD:** Kesehatan Masyarakat Desa; **TibKMD:** Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa; dan **JahKMD:** Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Desa.
- 2) Tanda lingkaran merah untuk Total Sampel menunjukkan bahwa Sub Indeks pembentuk Indeks Pembangunan Desa (IPDesa) untuk komponen AIMD dan KesMD mempunyai derajat korelasi terhadap IPDesa yang sama besarnya, yaitu sebesar 0,5370.

**Gambar 4.2** Besaran atau Derajat Korelasi antara Indeks Pembangunan Desa (IPDesa) dengan Indikator Pembentuk IPDesa di Kabupaten Sragen – Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

**Sumber:** Diolah dari Tabel 4.1 dan *Lampiran*



**Lampiran 1** Besaran Indeks Pembangunan Desa (IPDesa) dan Sub – Indeks Pembentuknya Berdasar Pembagian Wilayah Perdesaan di Kabupaten Sragen – Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Keterangan Wilayah Studi	Sub Indeks Pembentuk Indeks Pembangunan Desa (IPDesa)								Indeks Pembangunan Desa (IPDesa)
	Sub Indeks 1 (KAJPP)	Sub Indeks 2 (KKD)	Sub Indeks 3 (SPPD)	Sub Indeks 4 (AIMD)	Sub Indeks 5 (DikMD)	Sub Indeks 6 (KesMD)	Sub Indeks 7 (TibKMD)	Sub Indeks 8 (JahKMD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Wilayah Pusat ( n = 30 )</b>									
- Minimal	2.6350	1.2729	0.7937	4.0580	3.2508	2.6330	3.5005	2.6394	3.3166
- Maksimal	6.3447	5.3686	4.1049	7.5073	7.9283	6.1040	6.4045	5.3862	5.0846
- Rerata	4.2167	3.4233	2.4579	6.0486	5.4260	4.5538	5.5595	3.7153	4.4251
- Simpangan Baku (SD)	0.8997	0.9833	0.8030	0.7650	1.0839	1.0106	0.7101	0.6389	0.3679
- Koefisien Variasi (SD/Rerata)	21.34	28.73	32.67	12.65	19.98	22.19	12.77	17.20	8.31
<b>Wilayah Tengah ( n = 63 )</b>									
- Minimal	1.2165	1.3718	0.6822	0.2870	0.7144	2.2287	2.7516	2.1594	2.8342
- Maksimal	7.6605	6.6421	5.8737	8.6040	8.1118	7.9803	7.0019	5.3922	5.7422
- Rerata	4.6794	3.6450	2.3950	5.4515	4.6908	5.1556	5.4684	3.5534	4.3799
- Simpangan Baku (SD)	1.4327	1.2797	1.2814	1.7900	1.3917	1.0963	0.7451	0.9183	0.6695
- Koefisien Variasi (SD/Rerata)	30.62	35.11	53.50	32.84	29.67	21.26	13.63	25.84	15.29
<b>Sampel/Observasi Total ( n = 93 )</b>									
- Minimal	1.2165	1.2729	0.6822	0.2870	0.7144	2.2287	2.7516	2.1594	2.8342
- Maksimal	7.6605	6.6421	5.8737	8.6040	8.1118	7.9803	7.0019	5.3922	5.7422
- Rerata	4.5302	3.5735	2.4153	5.6441	4.9279	4.9615	5.4978	3.6056	4.3945
- Simpangan Baku (SD)	1.2984	1.1913	1.1449	1.5565	1.3398	1.1009	0.7314	0.8383	0.5875
- Koefisien Variasi (SD/Rerata)	28.66	33.34	47.40	27.58	27.19	22.19	13.30	23.25	13.37

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS. (2010).

**Lampiran 2 Hasil Perhitungan Tingkat Korelasi (*Correlations*) antara Indeks Pembangunan Desa (IPDesa) dan 8 (delapan) Sub Indeks Pembentuknya di Kabupaten Sragen – Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009**

Variabel / Indikator	Catatan	Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik (KAJPP)	Kekayaan dan Keuangan Desa (KKD)	Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa (SPPD)	Akses Informasi Masyarakat Desa (AIMD)	Pendidikan Masyarakat Desa (DikMD)	Kesehatan Masyarakat Desa (KesMD)	Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa (TibKMD)	Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Desa (JahKMD)	Indeks Pembangunan Desa (IPDesa)
Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik (KAJPP)	Pearson Correlation	1	.188	.182	-.239(*)	.272(**)	.405(**)	.034	-.039	.460(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.071	.081	.021	.008	.000	.743	.708	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Kekayaan dan Keuangan Desa (KKD)	Pearson Correlation	.188	1	-.111	-.211(*)	-.059	-.212(*)	-.019	-.346(**)	.077
	Sig. (2-tailed)	.071	.	.288	.042	.573	.041	.859	.001	.462
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa (SPPD)	Pearson Correlation	.182	-.111	1	.456(**)	.270(**)	.276(**)	.336(**)	.648(**)	.726(**)
	Sig. (2-tailed)	.081	.288	.	.000	.009	.007	.001	.000	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Akses Informasi Masyarakat Desa (AIMD)	Pearson Correlation	-.239(*)	-.211(*)	.456(**)	1	.233(*)	.007	.335(**)	.525(**)	.537(**)
	Sig. (2-tailed)	.021	.042	.000	.	.024	.950	.001	.000	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Pendidikan Masyarakat Desa (DikMD)	Pearson Correlation	.272(**)	-.059	.270(**)	.233(*)	1	.358(**)	.321(**)	.227(*)	.663(**)
	Sig. (2-tailed)	.008	.573	.009	.024	.	.000	.002	.028	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Kesehatan Masyarakat Desa (KesMD)	Pearson Correlation	.405(**)	-.212(*)	.276(**)	.007	.358(**)	1	.145	.286(**)	.537(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.041	.007	.950	.000	.	.166	.005	.000



Variabel / Indikator	Catatan	Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik (KAJPP)	Kekayaan dan Keuangan Desa (KKD)	Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa (SPPD)	Akses Informasi Masyarakat Desa (AIMD)	Pendidikan Masyarakat Desa (DikMD)	Kesehatan Masyarakat Desa (KesMD)	Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa (TibKMD)	Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Desa (JahKMD)	Indeks Pembangunan Desa (IPDesa)
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa (TibKMD)	Pearson Correlation	.034	-.019	.336(**)	.335(**)	.321(**)	.145	1	.230(*)	.520(**)
	Sig. (2-tailed)	.743	.859	.001	.001	.002	.166	.	.027	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Desa (JahKMD)	Pearson Correlation	-.039	-.346(**)	.648(**)	.525(**)	.227(*)	.286(**)	.230(*)	1	.579(**)
	Sig. (2-tailed)	.708	.001	.000	.000	.028	.005	.027	.	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Indeks Pembangunan Desa (IPDesa)	Pearson Correlation	.460(**)	.077	.726(**)	.537(**)	.663(**)	.537(**)	.520(**)	.579(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.462	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Sub Indeks ke-		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

Catatan: (\*) : Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 (\*\*) : Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program Statistik SPSS (2010).